RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 95/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja, Partisipasi Publik Dalam Pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Diskriminasi Memperoleh Pendidikan.

I. PEMOHON

1. Zakarias Horota (Pemohon I)
2. Agustinus R. Kambuaya (Pemohon II)
3. Elias Patege (Pemohon III)

Kuasa Hukum:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Firda Reza Atariq, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Oktober 2020

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan pengujian formil dan materiil Pasal 16, dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- b. Perorangan warga negara Indonesia;*
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- d. Badan hukum publik atau privat; atau*
- e. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- b. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- c. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- d. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- e. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- f. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Wakil Ketua Dewan Adat Papua. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c UU Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Para Pemohon mengujikan pengujian formil dan materiil Pasal 16, dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Keberlakuan Undang-Undang *a quo* telah merenggut hak para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebab, undang-undang *a quo* telah mereduksi partisipasi para Pemohon untuk turut serta dalam proses penyusunan AMDAL serta mengajukan keberatan yang mana sejatinya keikutsertaan ini merupakan suatu upaya untuk perlindungan lingkungan hidup;
6. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa pascasarjana yang bergantung pada pendidikan dimana dengan akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja menjadikan Pendidikan sebagai ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan. Dengan begitu ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban sehingga, Pemohon sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu mengalami kerugian konstitusional.
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- Pengujian formil
- Pengujian Materiil

1. Pasal 16

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);*
- b. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);*
- c. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); dan*
- d. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).*

2. Pasal 65 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

2. Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

3. Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

4. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL

1. Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk Undang-Undang telah membentuk Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK pengujian formil diajukan apabila “pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang adalah Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara *a quo*, diuraikan bahwa para Pemohon: (a) mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan Undang-Undang, (b) kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo*, (c) kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang *a quo* karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan (d) kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.
3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Bahwa salah satu elemen “Negara Hukum” menurut Julius Stahl adalah adanya “Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,” di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus merujuk pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
4. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.”
5. Bahwa pembentuk Undang-Undang *a quo* mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU 12/2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan. Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan

melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang justru tetap sahkan Undang-Undang *a quo* meski ditolak habis-habisan.

6. Keabsahan formil Undang-Undang melihat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, salah satunya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK yang mengatur

“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

7. Dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi pula telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19], halaman 82-83 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

8. Dengan demikian, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

9. Bahwa Pasal 142 ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPR menyatakan:

“(1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan 2 (dua) tingkat pembicaraan.

(2) 2 (dua) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden; dan*
- b. Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.”*

10. Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tata Tertib DPR menyatakan:

“Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam:

- a. rapat kerja;*
- b. rapat panitia kerja;*
- c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/ atau*
- d. rapat tim sinkronisasi.”*

11. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Tata Tertib DPR menyatakan:

“Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan:

- a. daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan rumusan "tetap", langsung disetujui sesuai dengan rumusan;*
- b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;*
- c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau*
- d. dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja.”*

12. Bahwa Pasal 159 Tata Tertib DPR menyatakan:

“(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3) *Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.*

13. Bahwa Pasal 161 Tata Tertib DPR menyatakan:

“(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.”

14. Bahwa selanjutnya Pasal 163 Tata Tertib DPR menyatakan:

“Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:

a. pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus;

b. laporan panitia kerja;

c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;

d. pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;

e. penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan

f. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.”

15. Bahwa Pasal 164 ayat (1) Tata Tertib DPR menyatakan:

“Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

16. Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang *a quo* secara nyata tidak sesuai dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

B. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL.

I. Berkurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
2. Tereduksinya partisipasi publik dalam perkara *a quo* ditunjukkan dengan adanya ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang menimbulkan terlimitasinya kontribusi masyarakat dalam penyusunan AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 26 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup UU Cipta Kerja;
3. Hal ini teraktualisasi dengan ketentuan yang menyebutkan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup;
4. Sementara itu, dalam pengaturan yang terdahulu, masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL telah diatur secara komprehensif, yaitu meliputi:
  - a. Masyarakat yang terkena dampak;
  - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
5. Selanjutnya, dalam undang-undang *a quo* telah menghapuskan ketentuan yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Disisi lain, perlu diingat bahwa lingkungan terkait merupakan tempat tinggal dari para Pemohon, sehingga perlu dibuka ruang untuk diajukannya keberatan apabila ketentuan AMDAL yang telah dibuat tidaklah sesuai dengan praktik di lapangan;

6. Maka dari itu, keberlakuan undang-undang *a quo* yang mereduksi partisipasi masyarakat berimplikasi pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk menyuarakan dan mendapatkan perlindungan hak-hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

II. Pasal *a quo* mendiskriminasi kesempatan pendidikan karena menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan menerapkan ikan

1. Pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran (pintar, cerdas) dan bertubuh sehat.
2. Pendidikan juga termasuk ke dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa dalam tujuan bangsa Indonesia tersebut diwujudkan dengan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari frasa tersebut juga, jelas ditunjukkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya;
3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
4. Pasal *a quo* berkontradiksi dengan yaitu Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan yang telah disebutkan. Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (1) terdapat kalimat “Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ini pada dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha tidak berlaku

pada sektor Pendidikan kecuali lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur tersendiri.” Penjelasan tersebut mendiskriminasi kawasan ekonomi khusus sehingga di kawasan tersebut pendidikan harus memiliki izin usaha yang mana hal ini bisa diartikan bahwa pendidikan dikomersialisasikan;

5. Komersialisasi pendidikan tidak sesuai dan mendiskriminasi konsep pendidikan itu sendiri. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
6. Komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat
7. Dengan demikian, keberlakuan undang-undang *a quo* yang mengomersialisasikan pendidikan berdampak yaitu diskriminasi kesempatan menikmati pendidikan secara merata dan mencederai hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji formil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 65 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).